

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partisipasi Masyarakat

Mohtar Mas'ood (1994) menyatakan bahwa persoalan berat yang dihadapi masyarakat Dunia ketiga pada umumnya adalah “*organization-gap*”. Hubungan antara masyarakat ibukota dengan sebagian besar masyarakat desa di Negara-negara miskin hampir-hampir terputus. Kalau toh ada, yang terjadi adalah hubungan yang bersifat satu arah, “*top down*” dan ekstratif, bukan hubungan yang bersifat dan saling dukung. Karena itu yang di perlukan bukan pendekatan yang menekankan pembentukan kapital, tetapi yang lebih penting adalah mempelajari tenaga kerja. Dan ini mengharuskan pemberian prioritas pada persoalan partisipasi.

Jenis partisipasi apa yang mungkin dilakukan oleh rakyat pedesaan. Menurut dua ilmuwan ini, partisipasi itu dapat diarahkan pada empat sasaran, yaitu partisipasi dalam : (1) pembuatan keputusan; (2) penerapan keputusan; (3) menikmati hasil; dan (4) evaluasi hasil.

Mulyadi (2009) memberikan rumusan partisipasi masyarakat yang lebih aplikatif dalam bentuk sebagai *participation of decision making*, *participation in implementation*, *participation in benefit*, dan *participation in evaluation*. Bentuk partisipasi yang dikemukakan tersebut merupakan bentuk partisipasi yang lebih nyata terjadi di masyarakat. Pertama partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Menurut Arnstein (1969), terdapat delapan tingkatan dalam partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut :

a. Manipulasi

Partisipasi manipulasi adalah partisipasi tingkatan terendah yang ada di tahapan tingkatan partisipasi. Pada tingkatan ini pemerintah akan membuat program yang dimana membentuk suatu komite (badan penasehat) untuk mendukung pemerintah. Dengan dibentuknya komite pemerintah memanipulasi kepada masyarakat bahwa program tersebut sangatlah berpengaruh pada

masyarakat dengan kata lain partisipasi masyarakat hanya dijadikan kendaraan oleh pemerintah, sehingga mengakibatkan tidak adanya peran serta masyarakat.

b. Terapi

Partisipasi terapi merupakan tingkatan atau tahapan kedua dari partisipasi. Pada tingkatan ini pemerintah membentuk suatu program yang dimana sifatnya mengubah pola pikir masyarakat tentang suatu kesenjangan antara masyarakat miskin dan kaya, kesenjangan kekuasaan dan lain sebagainya. Sehingga dapat merubah pola pikir masyarakat menjadi lebih percaya diri dan merupakan komponen penting dalam masyarakat

c. Pemberian informasi

Informasi merupakan tangga ketiga. Tingkatan ini merupakan transisi antara *non participation* dengan tokenism. Pada tingkat ini terdapat 2 karakteristik yang bercampur, yaitu:

- 1) Pemerintah memberi informasi mengenai hak, tanggung jawab, dan berbagai pilihan masyarakat, hal ini adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat.
- 2) Pemberian informasi hanya bersifat komunikasi satu arah (dari pemerintah kepada masyarakat) berupa negosiasi terhadap rencana program yang akan dilakukan, tanpa adanya umpan balik (*feedback*) dari masyarakat sehingga kecil kemungkinan untuk mempengaruhi rencana program pembangunan tersebut. Media massa, poster, pamflet dan tanggapan atas pertanyaan, merupakan alat yang sering digunakan dalam komunikasi satu arah.

d. Konsultasi

Ditahapan ini pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengundang ide atau pemikiran masyarakat, namun komunikasi antara dua arah ini hanya buatan karena tidak dijadikannya ide –ide atau pemikiran masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Jadi partisipasi dalam tahapan ini hanyalah menjadi keharusan yang semu.

e. Perujukan

Peran atau partisipasi masyarakat ditahapan ini sudah mulai terlihat meskipun hanya sedikit, dapat kita lihat dari keterlibatannya menjadi anggota komite dengan kata lain masukan atau gagasan dari masyarakat berpenghasilan rendah masih ditampung meskipun keputusan tetap pada yang berkuasa. Hal ini disebabkan karena jumlah masyarakat pada anggota komite cenderung sedikit dibandingkan anggota instansi pemerintah.

f. Kemitraan

Kemitraan atau kerjasama antara masyarakat dan pemegang kekuasaan, di sini masyarakat bernegosiasi. Pemerintah membagi tanggung jawab dengan masyarakat terhadap perencanaan, pengambilan keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai permasalahan melalui badan kerjasama. Setelah adanya kesepakatan tidak dibenarkan jika ada perubahan yang sifatnya sepihak.

g. Pelimpahan Kekuasaan

Pada tingkat ini, masyarakat diberi limpahan kekuasaan untuk membuat keputusan pada rencana atau program-program pembangunan yang bermanfaat bagi mereka

h. Pengawasan Masyarakat

Pada tingkat ini, masyarakat mempunyai kekuatan penuh untuk mengukur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenangan penuh dibidang kebijaksanaan dan masyarakat dapat langsung berhubungan dengan pihak-pihak luar untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana tanpa melalui perantara pihak ketiga.

2.1.1 Bentuk dan Jenis Partisipasi

Bila dilihat dari bentuk dan tahapan partisipasi, maka tahapan partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa tahapan. Hoofsteede (1971), dalam hal ini membagi partisipasi menjadi tiga angkatan, antara lain :

- a) Partisipasi Inisiasi adalah partisipasi yang mengundang inisiatif dari pemimpin desa, baik formal, maupun informal, ataupun dari anggota masyarakat mengenai suatu proyek, yang nantinya proyek tersebut merupakan kebutuhan bagi masyarakat.
- b) Partisipasi Legitimasi adalah partisipasi pada tingkat pembicaraan atau pembuatan keputusan tentang proyek tersebut.
- c) Partisipasi Eksekusi adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan.

Dari ketiga tahapan partisipasi di atas, partisipasi inisiasi mempunyai kadar lebih tinggi dibanding partisipasi legitimasi dan eksekusi. Di sini penduduk tidak hanya sekedar menjadi obyek pembangunan saja, tetapi sudah dapat menentukan dan mengusulkan segala sesuatu rencana yang dilaksanakan.

Dilihat dari jenisnya, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat bermacam-macam sesuai dengan kemampuan, seperti tertera di bawah ini :

- a) Partisipasi buah pikiran, adalah jenis partisipasi yang diberikan seperti menyumbangkan buah pikiran, pengalaman, pengetahuan, dalam pertemuan rapat.
- b) Partisipasi tenaga, adalah jenis partisipasi yang diberikan dalam berbagai kegiatan, seperti untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan untuk orang lain, partisipasi spontan atas dasar suka rela.
- c) Partisipasi harta benda, partisipasi yang diberikan oleh seseorang dalam suatu kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- d) Partisipasi keterampilan dan kemampuan, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
- e) Partisipasi sosial, adalah jenis partisipasi yang diberikan sebagai tanda keguyuban, seperti turut arisan, koperasi melayat, (dalam peristiwa kematian) tabungan dan sebagainya. (Santoso Sastropuro 1988).

2.1.2 Fungsi Partisipasi

Menurut Santoso (2005) , menyebutkan bahwa fungsi dari partisipasi masyarakat adalah :

- a. Partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan
- b. Partisipasi masyarakat sebagai strategi
- c. Partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi
- d. Partisipasi masyarakat sebagai alat penyelesaian sengketa
- e. Partisipasi Masyarakat sebagai terapi.

2.1.3 Prinsip-prinsip Partisipasi

Prinsip-prinsip partisipasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Departement For International Development* (DFID) (Seumampow 2004) adalah :

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu proyek atau suatu keputusan pembangunan,
- b. Transparansi, semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- c. Kesetaraan kewenangan. Berbagai pihak, yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- d. Kesetaraan tanggung jawab. Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- e. Pemberdayaan. Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

2.1.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat

Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet, 1994). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi. Seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet 1994).

Ife (2008) juga mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, antara lain :

a) Penghargaan

berbagai bentuk partisipasi harus diakui dan dihargai. Ini akan semakin membuat masyarakat terdorong untuk berpartisipasi.

b) Dukungan struktur masyarakat

Struktur masyarakat di lingkungan tersebut tidak mengucilkan setiap orang yang turut berpartisipasi. Lingkungan masyarakat tersebut harus mendukung kelemahan yang mungkin ada dalam diri setiap warganya. Seperti ketidakpercayaan diri, lemah dalam berpikir atau berkata-kata.

c) Dukungan sarana

Seseorang dalam berpartisipasi harus juga didukung oleh sarana, seperti adanya sarana transportasi. Kemudian kemudahan mengakses lokasi atau tempat kegiatan harus diperhitungkan, begitu pula dengan waktu pelaksanaan kegiatannya.

d) Kebutuhan masyarakat

Orang-orang akan berpartisipasi apabila mereka merasakan isu atau aktifitas-aktifitas yang dilakukan merupakan hal penting.

Menurut Sastropetro (1985) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.

Penginterpretasian yang dangkal terhadap agama, kecenderungan untuk menyalahartikan motivasi, tujuan dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk seperti halnya terjadi di beberapa negara dan tidak terdapatnya kesempatan berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

2.2 Masyarakat Peduli Api (MPA)

MPA menurut Peraturan Dirjen PHKA Kemenhut No: P. 2/IV-SET/2014 yaitu masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih / diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Dimana tugas MPA antara lain memberikan informasi kepada pihak yang berwenang terkait kejadian kebakaran hutan dan pelaku pembakaran, menyebarluaskan informasi peringkat bahaya kebakaran hutan dan lahan, melakukan penyuluhan secara mandiri atau bersama-sama dengan petugas, serta melakukan pertemuan secara rutin dalam rangka penguatan kelembagaan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor : P.3 /PPI/SET/KUM.1/1/2018 Pasal 7 tentang rekrutmen calon anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga negara Indonesia (WNI)
- b. Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa sasaran
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Berkelakuan baik
- e. Mendaftarkan diri sebagai tenaga relawan
- f. Berusia minimal 17 tahun
- g. Membuat surat pernyataan sebagai tenaga relawan

Pembentukan MPA penting dilakukan karena dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu potensi bencana yang disebabkan oleh faktor alam maupun nonalam (faktor manusia). Apalagi studi dan analisis yang

dilakukan berbagai pihak berkompeten, baik lembaga pemerintahan maupun organisasi-organisasi nasional dan internasional menyimpulkan bahwa hampir 100 persen kebakaran hutan dan lahan di Indonesia disebabkan oleh perbuatan manusia (Syaufina, 2008).

Sejatinya MPA merupakan garda terdepan dalam pencegahan karhutla yang ada di wilayahnya. Secara spesifik revitalisasi MPA dapat dilakukan melalui :

b. Penguatan kelembagaan MPA dengan membuat regulasi terpadu secara nasional tentang MPA dan lembaga-lembaga terkait di dalamnya. Hal ini di perlukan untuk mengatur sistem koordinasi, memberikan perlindungan hukum dan jaminan sosial ekonomi kepada anggota MPA.

c. Memberikan pelatihan teknis pemadaman api. Kegiatan ini dapat melibatkan instansi pemerintah maupun perusahaan yang memiliki kompetensi dalam pemadaman api. Teknis pemadaman ini perlu dilakukan agar api tidak membesar dan menyebar secara masif. Pelatihan ini juga harus dibarengi dengan pemberian bantuan peralatan dan perlengkapan memadai.

d. Memberikan pelatihan dan pendampingan strategi komunikasi pencegahan karhutla. Aspek komunikasi ini penting dikuasai MPA, sebab pencegahan juga identik dengan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, maupun penyadaran masyarakat. Dalam konteks ini, selain kemampuan komunikasi interpersonal dan kelompok, MPA perlu menguasai penggunaan media komunikasi, baik media sosial, media massa, maupun media rakyat.

e. Memberikan insentif sebagai pengganti waktu dan tenaga anggota MPA yang mereka alokasikan untuk pencegahan karhutla. Insentif tersebut dapat berupa insentif langsung maupun pengembangan usaha produktif bagi keluarga anggota MPA.

Diharapkan dengan terbentuknya MPA dan pendayagunaan MPA maka kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan tetap terjaga melalui menurunnya luas areal kebakaran hutan dan lahan serta tertanganinya kebakaran hutan dan lahan secara cepat dan tepat.

2.3 Kebakaran Hutan dan Lahan

Definisi Kebakaran Hutan menurut SK. Menhut. No. 195/Kpts-II/1996 yaitu suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, dan air. Secara umum kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tiga faktor yaitu kondisi bahan bakar, cuaca, dan sosial budaya masyarakat. Kondisi bahan bakar yang rawan terhadap bahaya kebakaran adalah jumlahnya yang melimpah di lantai hutan, kadar airnya relatif rendah (kering), serta ketersediaan bahan bakar yang berkesinambungan. Faktor iklim berupa suhu, kelembaban, angin, dan curah hujan turut menentukan kerawanan kebakaran. Suhu yang tinggi akibat penyinaran matahari langsung menyebabkan bahan bakar mengering dan mudah terbakar, kelembaban yang tinggi (pada hutan dengan vegetasi lebat) mengurangi peluang terjadinya kebakaran hutan, angin juga turut mempengaruhi proses pengeringan bahan bakar serta kecepatan menjalarnya api sedangkan curah hujan mempengaruhi besar kecilnya kadar air yang terkandung dalam bahan bakar.

2.4 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan

Untuk menentukan alternatif usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, maka sebab-sebab terjadinya kebakaran hutan sangat penting diketahui. Penyebab terjadinya kebakaran hutan adalah sumber api. Sumber api kebakaran hutan dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa alam dan aktifitas manusia dalam menggunakan api. Pada dasarnya kebakaran hutan di Indonesia banyak terjadi sebagai akibat adanya akumulasi bahan bakar (serasah dan sisa tebangan yang kering) yang terdapat di dalam hutan maupun kawasan hutan, adanya sumber api serta adanya tiupan angin kering yang kencang pada musim kemarau atau pada cuaca kering.

Akumulasi bahan bakar kering di dalam hutan terjadi sebagai akibat pengaruh faktor manusia yaitu adanya kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya antara lain berupa usaha-usaha perladangan dan penebangan hutan. Sementara itu faktor alam, yaitu adanya kondisi cuaca atau cuaca ekstra kering dan berlangsung cukup lama juga akan membantu terjadinya akumulasi bahan bakar kering yang terdapat di dalam hutan.

Seperti diketahui sebagai akibat terjadinya kebakaran hutan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yaitu rusaknya sumber daya alam yang ada sehingga tidak berfungsi secara wajar dan lestari.

Di samping berbagai kebijakan dan peraturan perundangan dalam lapangan pembangunan, maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup membutuhkan pula dilakukannya kegiatan-kegiatan penunjang kegiatan tersebut.

Brown dan Davis (1973) menyatakan bahwa proses kebakaran dapat terjadi karena adanya segitiga api. Segitiga api adalah bentuk sederhana untuk menggambarkan proses pembakaran dan aplikasinya. Berikut adalah Gambar 1 segitiga api tersebut:



Gambar 1 Segitiga Api

Upaya Pencegahan yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Pembuatan sekat bakar pada lokasi yang mudah terjadi kebakaran
- b. Membersihkan bahan bakar di bawah tegakan hutan/lahan
- c. Melakukan pembakaran terkontrol
- d. Memperhatikan waktu pembakaran
- e. Membuat tabat untuk mengairi areal gambut yang kering dan mudah terbakar.

- f. Menyiapkan peralatan pemadaman, alat transportasi, sumber air (sumur bor, dll)
- g. Membuat dan memasang papan peringatan bahaya kebakaran atau himbauan dari kepala desa tentang pencegahan kebakaran hutan.

Khususnya di bidang ilmu dan teknologi, pendidikan dan latihan, cara-cara penyerasian usaha-usaha pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pada dasarnya usaha pencegahan kebakaran hutan ditujukan pada dua hal yaitu (a) mencegah dan mengurangi terjadinya api, (b) mengurangi akumulasi bahan bakar yang dapat menimbulkan kebakaran.

Evans (1982) mengajukan pendekatan pencegahan kebakaran yang dipersiapkan untuk mencegah atau menghindari kerusakan hutan dari kebakaran melalui :

- a. Mencegah api dari luar hutan masuk ke areal hutan.
- b. Mencegah kebakaran terjadi dalam hutan.
- c. Membatasi penyebaran api bila terjadi.

Menurut Sulthoni (1999) pendekatan tersebut dapat dilakukan menggunakan strategi yang mencakup tiga komponen yaitu : (a) Pendekatan klimatologi, (b) Pendekatan silvikultur, (c) Pendekatan sosial ekonomi.

A. Pendekatan Klimatologi

Faktor cuaca yang sangat berperan dalam kebakaran hutan adalah curah hujan, arah dan kecepatan angin. Pada angin yang kecepatannya rendah, kebakaran hutan relatif sulit meluas dan bila meluas arah perluasannya ke segala penjuru, sehingga bentuk areal yang terbakar bundar. Apabila angin berkecepatan tinggi maka medan kebakaran akan meluas searah dengan mata angin sehingga medan kebakarannya berbentuk oval atau persegi panjang.

Sehubungan dengan itu, data curah hujan, suhu, kelembaban udara dan kecepatan angin merupakan prasyarat yang sangat penting di setiap kesatuan pemangkuan hutan. Berdasarkan data tersebut akan diketahui bulan-bulan kering di setiap kesatuan pemangkuan hutan sehingga persiapan dan kesiapan menghadapi kerawanan kebakaran dapat dilakukan terutama kawasan yang

terjamah atau berhubungan dengan kegiatan manusia yang memanfaatkan api (*early warning system*).

B. Pendekatan Silvikultur

Perlindungan hutan merupakan salah satu komponen silvikultur yang penting karenanya perlu mendapat perhatian dalam usaha memperoleh tegakan akhir yang optimal. Banyak faktor penyebab kerusakan hutan tetapi kerusakan akibat kebakaran dapat menimbulkan problema yang serius, bahkan sering menjadi faktor pembatas terhadap keberhasilan program penanaman hutan. Tegakan hutan dari jenis jarum lebih rentan terhadap bahaya kebakaran hutan karena jenis-jenis ini merupakan penghasil getah yang mudah terbakar dan mempunyai serasah yang sukar terurai. Oleh karena itu untuk memperoleh vigor tananaman yang tinggi maka pertumbuhan yang cepat dan seragam tidak cukup menjamin kelestariannya tanpa adanya penanganan yang khusus terhadap bahaya kebakaran tersebut.

C. Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan sosial ekonomi masyarakat bertitik tolak dari tiga asumsi pokok. Asumsi pertama yaitu penjagaan keamanan hutan dapat berhasil bila masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif di dalamnya.

Asumsi kedua, yaitu apabila masyarakat memiliki kesadaran akan fungsi hutan serta tidak ada faktor lain (eksogen) yang memaksanya, maka harapan agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi aktif untuk menjaga keamanan hutan dari bahaya kebakaran maupun jenis kerusakan lainnya dapat terlaksana.

Asumsi ketiga, yaitu masyarakat juga merupakan unsur pembentuk sumber api di dalam hutan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran,

Berdasarkan asumsi tersebut maka beberapa langkah pokok yang perlu ditempuh dalam pendekatan sosial ekonomi adalah sebagai berikut; (a) usaha meningkatkan kesadaran akan fungsi hutan; (b) usaha mencegah/mengurangi terjadinya sumber api yang dibuat oleh manusia di dalam hutan; dan (c) memasyarakatkan teknik-teknik pengelolaan penggunaan api di dalam hutan.

D. Pendekatan Tertib Hukum

Karena kebakaran hutan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat yang sifatnya sensitif, maka penanggulangannya perlu didasari oleh landasan hukum yang kuat serta adanya peraturan daerah yang mengikat.

a. Metode Pemadaman Langsung dan Pencegahan Kebakaran Hutan

Pemadaman kebakaran secara langsung pada dasarnya diarahkan untuk mengusahakan agar salah satu atau lebih dari komponen kebakaran, misalnya; bahan bakar potensial, dapat dikurangi atau dihilangkan. Suhu tinggi dapat diturunkan menggunakan air yang disemprotkan ketempat kebakaran hutan yang terjadi. Pembuatan ilar tidak permanen di depan arah pergerakan api dapat merupakan pilihan untuk pemadaman secara langsung.

b. Mengembangkan sarana komunikasi

Kebakaran hutan pada umumnya terjadi sangat cepat. Informasi penemuan kebakaran dan pergerakan yang cepat dalam pengendaliannya akan mengurangi kerusakan yang terjadi. Penemuan awal kebakaran dapat dilakukan dengan beberapa cara misalnya membangun menara pengawas api atau dilakukan dari tempat-tempat yang tinggi. Penemuan itu harus diikuti oleh kemampuan pemberitahuan yang cepat dan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sarana komunikasi misalnya telepon, radio dua arah, atau dapat pula menggunakan isyarat-isyarat tradisional setempat yang paling tepat (misalnya “kentongan”).

c. Peringatan dan penyuluhan

Catatan tentang kebakaran hutan yang telah terjadi selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh kegiatan manusia, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Oleh karena itu memberikan pengertian kepada penduduk yang tinggal di sekitar hutan atau yang melakukan kegiatan dalam hutan tentang bahaya dan kerusakan yang timbul oleh adanya kebakaran hutan, dapat mengurangi peluang dan resiko terjadinya kebakaran hutan. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui program penyuluhan lewat media masa atau peringatan melalui papan dan tanda peringatan pada tempat-tempat tertentu.

Larangan tertentu kegiatan manusia pada areal-areal rawan kebakaran juga dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran hutan.

d. Organisasi dan perencanaan pengendalian kebakaran

Perencanaan pengendalian kebakaran idealnya merupakan dokumen tertulis yang memuat strategi pengendalian dan menjelaskan tentang (a) apa yang harus dilakukan, (b) siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindakan, dan (c) di mana tindakan pengendalian harus dilakukan. Perencanaan harus di perbarui dan disesuaikan secara berkala sesuai dengan iklim mikro setiap wilayah perkembangan hutan dan kemajuan peralatan yang sesuai.

2.5 Pemadaman Kebakaran Hutan

Demi efektifitas pemadaman kebakaran hutan dan lahan, diperlukan deteksi dini dan pelaporan yang baik. Jika deteksi dini tidak efisien, kerusakan yang ditimbulkan akibat kebakaran, dapat menjadi sedemikian besar karena upaya penanggulangan yang terlambat. Pemadaman belum dilakukan sampai suatu kebakaran dapat diketahui dan dideteksi. Selang waktu antara mulainya kebakaran dan datangnya tenaga pemadam ke lokasi kebakaran, mencakup waktu-waktu untuk beberapa jenis kegiatan, yaitu : deteksi, pelaporan, persiapan, pemadaman, dan mobilisasi.

Cara-cara deteksi yang mungkin dapat dilakukan antara lain :

- a. Deteksi dan pelaporan suka rela dari masyarakat;
- b. Patroli darat (secara rutin);
- c. Pengawasan dan menara api; dan
- d. Patroli udara dan penginderaan jarak jauh (satelit).

Pelaksanaan pemadaman dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung

A. Metode pemadaman langsung

Pada metode pemadaman langsung, semua upaya pemadaman diarahkan langsung pada lidah api. Dalam metode ini ada dua pilihan, yaitu :

- a. Menyerang muka api dengan *kepyokan* (alat pemukul) atau melemparkan material, seperti tanah/lumpur/pasir pada lidah api;

- b. Memulai pemadaman api dari bagian belakang dan bergerak kedepan melalui ke dua sisi api dan terakhir menguasai muka api.

B. Metode pemadaman tidak langsung

Metode pembakaran tidak langsung merupakan alternatif lain jika kebakaran menjalar dengan cepat dan melintasi bahan bakar berat, kemudian adalah sudah tidak memungkinkan lagi untuk diserang secara langsung.

a. Ilaran api

Ilaran api sering dibuat dengan bantuan alat sekop, garu, dan alat-alat pemotong (parang, gergaji tangan dan chain saw). Untuk material yang tidak terbakar atau lambat terbakar, sebaiknya dipinggirkan untuk menghindari resiko, sedangkan material yang mudah terbakar dimasukan ke dalam daerah yang pasti terbakar. Semak belukar dibersihkan dengan alat pemotong. Setelah itu, ditindaklanjuti dengan alat garu atau cangkul sepanjang ilaran untuk membersihkan humus, sehingga nampak tanah mineral.

b. Air

Air merupakan sarana pemadaman yang paling efektif. Jika tersedia dan dimanfaatkan untuk pemadaman dengan benar, maka hal itu merupakan alat terbaik dan tercepat untuk mengendalikan air.

c. Penggunaan Tanah / lumpur

Tanah, lumpur ataupun pasir, cukup efektif digunakan untukn mengendalikan api pada pohon mati, sisa-sisa tegakan atau pangkal-pangkal semak belukar. Tindakan tersebut sangat menolong untuk menekan api dan pendinginan.

d. Penggunaan ranting (*Kepyokan*)

Kebakaran permukaan (serasah atau semak) dapat juga dikendalikan dengan menggunakan ranting atau karung goni basah. Metode ini digunakan untuk pendinginan sisi api dalam pembuatan ilaran api.

e. Bakar balas

Bakar balas merupakan sebuah trik yang sangat berbahaya dan beresiko. Dengan demikian, cara tersebut dapat dilaksanakan apabila regu pemadaman betul-betul telah terlatih dan berpengalaman. Bakar balas dimulai pada titik yang

tertinggi pada ilaran untuk dibakar, kemudian, menyambung dengan areal yang terbakar.

2.6 Tipe Kebakaran Hutan

Apabila kondisi bahan bakar dan cuaca memungkinkan terjadinya penyalaan api dan kebakaran hutan terjadi, dikenal tiga tipe kebakaran hutan yaitu : api permukaan, api tajuk dan api dalam tanah (Davis dkk. 1959;Kimmins 1997).

A. Kebakaran permukaan (*surface fire*)

Kebakaran permukaan membakar bahan-bahan yang tersebar pada permukaan lantai hutan misalnya serasah, cabang dan ranting mati yang gugur, dan tumbuhan bawah tanah. Dengan keberadaan oksigen sangat melimpah, terlebih dibantu dengan adanya angin, kebakaran permukaan di sertai nyala api cukup besar berbentuk agak lonjong. Api permukaan relatif bergerak lebih cepat sehingga tidak membakar semua bahan yang ada, terutama humus. Kelembaban yang tinggi di lapisan humus di bawah serasah kering menyebabkan kebakaran permukaan tidak membakar lapisan humus tersebut. Kebakaran permukaan juga tidak meningkatkan suhu pada lapisan bahan organik dan horizon tanah di bawahnya, sehingga organisme renik di dalamnya tidak mati.

B. Kebakaran dalam tanah (*ground fire*)

Kebakaran dalam tanah terjadi pada jenis tanah yang mempunyai lapisan bahan organik yang tebal pada musim kemarau, misalnya gambut. Bahan bakar berupa tumpukan bahan organik yang tebal ini pada musim kemarau dapat menurun kadar airnya sehingga mudah terbakar bila ada api. Kebakaran yang terjadi tidak disertai dengan nyala api, sehingga hanya tampak asap yang mengepul pada permukaan lahan gambut. Proses kebakaran bergerak sangat lambat sehingga membakar seluruh bahan organik yang ada di atasnya. Kebakaran tanah mengakibatkan banyak hara yang hilang, mematikan organisme mikro dan hewan kecil yang hidup di dalam lapisan bahan organik. Kehilangan lapisan gambut dan bahan organik menyebabkan permukaan lapisan tanah tidak terlindung dan akan terjadi peningkatan aliran permukaan bila hujan turun. Aliran permukaan yang besar akan menyebabkan banjir dan erosi.

C. Kebakaran tajuk (*crown fire*)

Kebakaran dapat terjadi pada lantai hutan dengan lapisan tumbuhan bawah yang tebal dan kering, seringkali di tambah banyaknya sisa-sisa kayu penebangan atau bahan mati lainnya. Kebakaran hutan ini akan dengan cepat membakar bagian-bagian atas hutan, yang mengakibatkan kebakaran tajuk. Pada jenis tanaman berdaun jarum, kebakaran tajuk terjadi sangat mudah karena kandungan resin yang tinggi pada bagian-bagian pohonnya. Dengan kondisi oksigen yang melimpah, kebakaran menimbulkan nyala api yang besar dan sangat mudah bergerak dari satu tajuk ke tajuk lainnya di dekat panas yang ditimbulkan oleh nyala api yang besar dapat menurunkan kadar air bahan-bahan tumbuhan di dekatnya sehingga menambah kecepatan bagian-bagian tersebut terbakar.

2.7 Faktor Penyebab Kebakaran Hutan

Iklim mikro yang terdiri dari suhu, kelembaban udara relatif kecil dan kecepatan angin merupakan faktor alam yang mendorong terjadinya kebakaran hutan, terutama pada musim kemarau. Pada musim kemarau, kelembaban udara relatif rendah dan suhu meningkat sehingga menyebabkan serasah yang ada di lantai hutan menjadi kering dan mudah bakar. Angin merupakan unsur yang paling mampu mempermudah membesarnya api dan mempercepat menjalarnya ke areal yang lebih luas. Topografi kawasan yang miring dan adanya angin kencang akan menyebabkan api cepat menjalar.

Walaupun iklim mikro, topografi dan bahan bakar dalam kondisi yang rawan terhadap bahaya api, namun apabila pengelolaan kawasan hutan cukup memadai, bahaya kebakaran akan dapat dikendalikan maksimal. Pemantauan bahaya kebakaran pada musim kering oleh personel yang terampil dan menguasai permasalahan api dan kebakaran merupakan perangkat pengolaan yang di persyaratkan. Perangkat kerja berupa sarana dan prasarana penanggulangan merupakan

Sebab-sebab timbulnya kebakaran hutan sangat penting diketahui guna merencanakan dan menentukan cara pencegahan serta pengendalian kebakaran

hutan. Tiap-tiap daerah hutan mempunyai terjadinya kebakaran yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

A. Kegiatan manusia

a. Sengaja dibakar

Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk merugikan atau keuntungan bagi si pembakar.

b. Sisa pembakaran

Api berasal dari suatu pembakaran yang biasa dilakukan petani pada ladangnya yang letaknya berdekatan dengan hutan.

c. Api rokok

Api dari korek api dan puntung rokok orang-orang yang lewat di dekat hutan, biasanya terjadi di sepanjang jalan.

d. Perladangan berpindah

Di dalam perladangan berpindah, para peladang dengan sengaja menebangi pohon secara sporadis sebagai cara untuk menyiapkan lahan ladang. Pohon-pohon yang ditebang ini setelah kering akan menjadi sumber bahan bakar yang siap untuk disulut api dan akan membakar seluruh areal yang akan dijadikan ladang, bahkan areal di luar bakal ladangpun akan ikut terbakar apabila tidak ada usaha pengendalian api.

e. Rekreasi, berkemah dan pembalakan

Kegiatan rekreasi dan berkemah maupun pembalakan sering membuat perapian untuk keperluan memasak atau acara api unggun. Karena keteledoran atau belum di pahamiya "sadar bahaya api", api yang mereka buat tidak dimatikan pada saat mereka meninggalkan lokasi tersebut.

B. Faktor alam

a. Petir

Kebakatan hutan dapat terjadi secara langsung karena ada pohon yang terbakar karena sambaran petir, atau secara tidak langsung karena pohon yang mati tersambar petir menyediakan bahan bakar yang mudah terbakar.

b. Aktifitas gunung berapi

Di daerah khatulistiwa, kebakaran hutan yang disebabkan oleh letusan gunung berapi sangat terbatas, kecuali pada daerah-daerah yang mempunyai aktifitas vulkanis yang aktif dan itu terbatas di sekitar puncak gunung.

2.8 Penanganan Pasca Kebakaran Hutan

Penanganan pasca kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal terbakar.

Penanganan pasca kebakaran hutan dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pengumpulan bahan keterangan.
- b. Identifikasi
- c. Monitoring dan evaluasi
- d. Rehabilitasi
- e. Penegakan hukum.

Pengumpulan bahan keterangan, dilakukan melalui pengecekan lapangan pada areal yang terbakar dengan data titik panas yang terpantau, contoh pengumpulan :tanah, tumbuhan, dan bukti lainnya di areal yang terbakar. Identifikasi juga dilakukan untuk mengetahui penyebab kebakaran, luas kebakaran, tipe vegetasi yang terbakar, pengaruhnya terhadap lingkungan dan ekosistem. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau kegiatan pengendalian kebakaran yang telah dilakukan dan perkembangan areal bekas kebakaran. Rehabilitasi dilakukan dalam rangka merehabilitasi kawasan bekas terbakar dengan mempertimbangkan rekomendasi atau masukan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil identifikasi. Penegakan hukum dilakukan dalam rangka upaya proses penindakan hukum dibidang kebakaran hutan diawali kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan yang berkaitan dengan terjadinya pelanggaran sebagai bahan penyidikan.

2.9 Gambaran umum lokasi penelitian

2.9.1 Lokasi dan Batas Wilayah Desa

Desa Anjir Kelampayan terletak di kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dari ibukota Kabupaten Kuala Kapuas memerlukan waktu tempuh selama 1 jam ± dengan jarak 70 km ±, sedangkan dari kota Palangka Raya memerlukan waktu 3 jam ± dengan jarak 102 km ±. Secara geografis, Desa Anjir Kelampayan berada pada titik 02°49'40.698"S - 02°45'34.565"S, 114°17'55.928"E - 114°20'57.178"E. Desa Anjir Kelampayan terdiri dari dua bagian yang umum dikenal penduduk yaitu, Anjir kelampayan Baru dan Anjir Kelampayan Lama. Anjir kelampayan baru adalah wilayah pemukiman yang berada di sepanjang jalan lintas antara Kelurahan Mandomai dan Pulang Pisau. Sementara Anjir Kelampayan Lama adalah wilayah pemukiman yang terletak di sebelah selatan yang merupakan wilayah awal desa. Desa Anjir Kelampayan terdiri atas 14 Rukun Tetangga (RT)

Kawasan Desa Anjir Kelampayan termasuk daerah datar yang tidak memiliki bukit ataupun gunung yang tinggi. Desa Anjir kelampayan berada di antara dua buah sungai besar, yaitu sungai Kapuas dan sungai Kahayan. Tidak ada sungai yang melintasi desa, tetapi terdapat kanal yang menghubungkan Sungai Kapuas dan Sungai Kahayan yang membelah desa, Pembukaan kanal dilakukan sebagai langkah memudahkan kegiatan transfortasi air antara banjarmasin, kapuas dan palangka raya pada masa lalu. Informasi mengenai batas wilayah Desa Anjir Kelampayan dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini (Sumber : Profil Desa Anjir Kelampayan 2019).

Tabel 1 Batas wilayah Desa Anjir Kelampayan

Batas	Desa	Kecamatan	Kabupaten
Sebelah utara	Desa Anjir Pulang pisau	Kahayan Hilir	Pulang Pisau
Sebelah Timur	Desa Penda Katapi	Kapuas Barat	Kapuas
	Kelurahan Mandomai		
	Desa Saka Mangkahai	Kapuas Barat	Kapuas
	Desa Pantai		
	Desa Saka Tamiang		

Sebelah	Desa Saka Mangkakai	Kapuas Barat	Kapuas
Selatan	Desa Batu Nindan	Basarang	
Sebelah	Desa Mantaren 1	Kahayan Hilir	Pulang Pisau
Barat	Desa Mintin		

Sumber : Profil Desa Anjir Kelampayan, 2019.

2.9.2 Potensi Sumber Daya dan Hutan

Dengan luas 8.245,56 hektar (ha) Desa Anjir Kelampayan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu kawasan hutan 42,01 Ha, Kebun 0,33 Ha, Kebun Campuran 370,39 Ha, Kebun Jeruk 4,41 Ha, Kebun Karet 3.174, 40 Ha, Kebun Pisang 0,64 Ha, Kebun Sawit 3.268,06 Ha, Kebun Sengon 64,11 Ha. Potensi yang dimiliki Desa Anjir Kelampayan adalah sumber daya yaitu : Perkebunan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan selain itu ada kegiatan kerajinan seperti anyaman-anyaman dari rotan maupun purun. Mata pencaharian masyarakat Desa Anjir Kelampayan dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini. (Sumber: Profil Desa Anjir Kelampayan Tahun 2019)



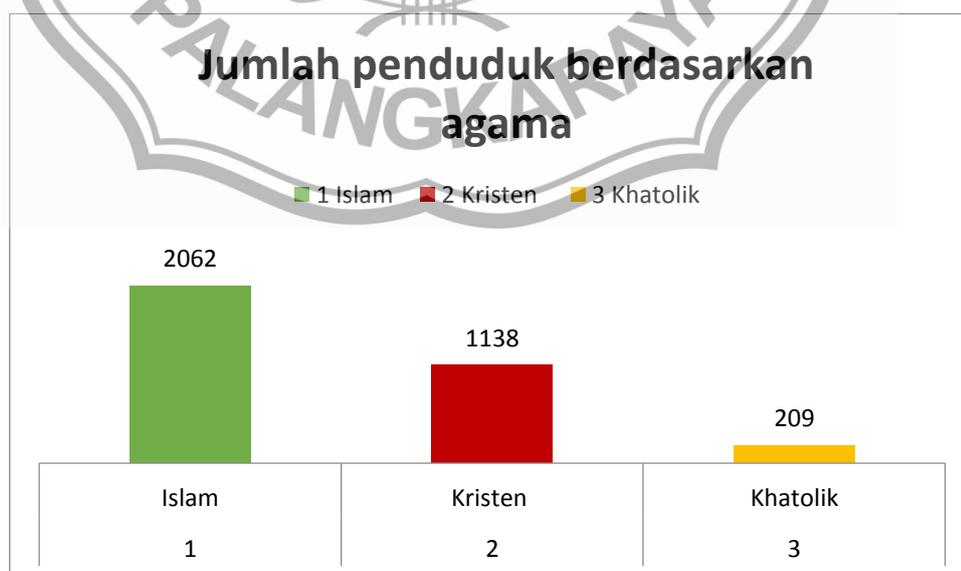
Gambar 2 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Anjir Kelampayan

Berdasarkan grafik 2 di atas mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Anjir Kelampayan adalah bertani padi gunung atau *padi banih gogo* dengan luasan

lahan sekitar 2.400 Ha. disebut demikian karena karena bertani dengan sistem ini memerlukan pengairan dan hanya mengandalkan dari kesuburan tanah. Hal ini sesuai dengan geografis Desa Anjir Kelampayan yang termasuk daerah datar.

2.9.3 Sosial Ekonomi dan Budaya

Sebagian besar masyarakat Desa Anjir Kelampayan merupakan Suku Dayak Ngaju dan suku-suku lainnya seperti Suku Banjar dan Suku Jawa yang hidup berdampingan dengan harmonis sampai sekarang. Kegiatan kebudayaan atau aktifitas sosial yang sejak zaman dulu sudah ada dan sampai sekarang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Anjir Kelampayan adalah pembersihan lingkungan dan apabila ada suatu perkawinan masyarakat Desa Anjir Kelampayan masih mengadakan budaya gotong royong dan ritual adat dayak seperti *lawang sekepeng*. *Lawang sakepeng* di laksanakan ketika acara-acara penting dan ada tamu penting yang datang. *Lawang sakepeng* adalah sebuah pintu gerbang/gapura yang dihiasi benang susun tiga yang dibentangkan menghalangi jalan masuk. Namun karena banyaknya pendatang dari luar sehingga budaya Dayak di Desa Anjir Kelampayan sedikit berkurang. Data keagamaan Desa Anjir Kelampayan tahun 2016 sampai sekarang berjumlah pemeluk : Islam (2.062 jiwa), Kristen (1.138 jiwa) Katholik (209 jiwa). Berikut adalah grafik kepercayaan masyarakat Desa Anjir Kelampayan.



Gambar 3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Berdasarkan grafik 3 di atas mayoritas pemeluk agama di Desa Anjir Kelampayan adalah agama Islam sekitar 2.062 jiwa atau 61 % yang kedua adalah agama Kristen dengan 1.138 jiwa atau 33% dan yang terakhir adalah agama Katolik yaitu 209 jiwa atau 6%.

Tabel 2 Kependudukan Desa Anjir Kelampayan

Data Kependudukan Desa Anjir Kelampayan					
	Tahun	Jumlah KK	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1.	2018	925	1.544	1.464	3.008
2.	2017	612	1.300	1.242	2.543
3.	2016	607	1.288	1.231	2.519
4.	2015	598	1.264	1.210	2.474
5.	2014	598	1.264	1.210	2.474
6.	2013	593	1.252	1.202	2.454

Sumber: Visualisasi Data Kependudukan Kemendagri, 2018

Pada tahun 2018, jumlah penduduk Desa Anjir Kelampayan mencapai 3.005 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 925. Terjadi kenaikan jumlah penduduk Desa Anjir Kelampayan. Sumber data yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kependudukan mengambil dari sumber data monografi Desa Anjir Kelampayan tahun 2018 dan data kondisi penduduk dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas.